

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DI KECAMATAN TUALANG
(Studi Kasus Perda Kab.Siak No.1 Tahun 2017)**

Sindriani Dakhi*

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
sindriani.dakhi0137@student.unri.ac.id

Sujianto

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
e-mail: fisip_suji@yahoo.com

ABSTRACT

Domestic wastewater is one of the most complex issues causing various problems that should be prioritized by the community and the government. This does not mean that this problem is not handled at all, but its management can still be described as poorly organized. Therefore, this research was carried out by looking at the extent of domestic wastewater management in Tualang District, Siak Regency with the theory used is Van Meter Van Horn. Qualitative research method with a case study approach. From this research, the results obtained are that domestic wastewater management in Tualang Subdistrict is very inefficient in terms of time cooperation with the community. This research also shows that population density causes limited land for sanitation development, which is only equipped with a Fecal Sludge Management Unit (IPLT), from the community side it is also still indifferent, other findings also show that population density makes land for sanitation development limited and people lack understanding of the impact of domestic wastewater. Recommendations from this research for implementing agents with communities that still lack participation, it would be better if the community is first empowered technically and knowledge of the dangers of domestic waste, also empowered how the habit of protecting the environment so that from this habit, the community can protect the environment, as the saying can ala usual so that thus, domestic wastewater treatment can reduce the level of environmental contamination and help protect public health.

Keywords: *Implementation, Management, Domestic wastewater*

ABSTRAK

Air limbah domestik ialah salah satu isu cukup kompleks menyebabkan berbagai persoalan yang harus menjadi prioritas bagi masyarakat dan pemerintah. Hal ini tidak berarti bahwa masalah ini tidak ditangani sama sekali, tetapi pengelolaannya masih dapat digambarkan sebagai tidak terorganisir dengan baik. Maka dari hal itu, penelitian ini di laksanakan dengan melihat sejauh mana pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan teori yang dipakai adalah Van Meter Van Horn. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dari penelitian ini hasil yang di dapat ialah pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Tualang sangat tidak efisien dari segi waktu kerja sama dengan masyarakat dari riset ini turut pula menunjukkan bahwa kepadatan penduduk menyebabkan terbatasnya lahan untuk pembangunan sanitasi, dimana hanya dilengkapi dengan unit Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), dari sisi masyarakat juga masih acuh tak acuh, temuan lain juga menunjukkan bahwa kepadatan penduduk membuat lahan untuk pembangunan sanitasi menjadi terbatas dan masyarakat kurang memahami dampak air limbah domestik. Rekomendasi dari riset ini untuk agen pelaksana dengan masyarakat yang masih kurang berpartisipasi alangkah baiknya dari masyarakatnya terlebih dahulu di berdayakan secara teknis dan pengetahuan akan bahaya limbah domestic tersebut, diberdayakan juga bagaimana kebiasaan untuk menjaga lingkungan sehingga dari kebiasaan ini, masyarakat bisa menjaga lingkungan, seperti pepatah bisa ala biasa sehingga dengan demikian, pengolahan air limbah rumah tangga dapat mereduksi tingkat kontaminasi lingkungan dan membantu melindungi kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Air limbah domestik

PENDAHULUAN

Kepadatan penduduk yang tinggi dan limbah domestik dalam jumlah besar, jika tidak ditangani, dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada limbah industri. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan komersial dan/atau perumahan (bangunan), restoran, dan perkantoran. Masyarakat sebagai produsen penghasil air limbah domestik perlu mengetahui cara melindungi lingkungan. Kemampuan pemerintah kota untuk melindungi lingkungan dapat membantu mengurangi penyakit, melestarikan tanah yang masih asli, dan menyediakan alternatif sementara untuk infrastruktur dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan Pengelolaan air limbah domestik telah diimplementasikan di berbagai wilayah demikian pula khususnya di kabupaten siak. Ini penting karena limbah domestik dapat mengandung unsur-unsur bersifat beracun yang dapat berbahaya bagi manusia. Kemudian Pemerintah melihat hal ini berpotensi dalam kerusakan yang lebih besar dan mengeluarkan suatu

kebijakan untuk air limbah rumahtangga ini dapat di kelola dengan baik. Peraturan mencakup aspek yang relevan seperti standar pengendalian, pengumpulan dan pembuangan air limbah rumah tangga yang sesuai dengan standar dan ketetapan yang ada.

Kebijakan ini memerlukan persetujuan dari semua pihak yang relevan dan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dimana Dinas Lingkungan Hidup(DLH), Dinas Pekerjaan Umum Tata ruang dan Permukiman (Pu Tarukim) yang saling terkoordinasi untuk pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan kewenangan daerah otonom. Pemerintah Kabupaten siak mengeluarkan Peraturan daerah No.1 Tahun 2017 untuk menjawab isu yang ada dalam masyarakat dengan berbagai fenomena yang terjadi terlebih di kecamatan tualang dengan jumlah penduduk yang tertinggi di kabupaten siak, dan kemudian mengerucut pada Kelurahan Perawang yang ada di Tualang dengan masyarakat heterogen kebijakan dimaksudkan agar penyelenggara dapat menyesuaikan dengan Peraturan yang ada yaitu SPAL (sistem Pengelolaan air Limbah) ,IPAL(Instalasi Pengelolaan Air limbah) , SPAL-S(Sistem Pengelolaan air Limbah), SPAL-D (Sistem Pengelolaan air Limbah domestic), SPAL-T(Sistem Pengelolaan Air Lumpur Tinja) dilakukan secara berkesinambungan.

Kemudian Pada Pasal 4 ayat 1,2 dan 3 Peraturan daerah kabupaten siak menegaskan SPAL dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan dan non fisik yang dimana Aspek non fisik yang dimaksud meliputi aspek kelembagaan, Keuangan, Administrasi, Peran Masyarakat, dan Hukum. Dalam rangka menetapkan kebijakan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik pemerintah menetapkan kriteria sesuai dengan standar dan prosedur untuk menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Siak. Pemantauan dan evaluasi SPAL-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dengan melakukan standar minimal Yaitu Sanitasi Masyarakat. Sesuai dengan Kepmendagri No. 648-82/Kep/Bangda/2015, bahwa Siak menjadi salah satu kabupaten/kota terpilih dalam pelaksanaan penyegaran kembali untuk pemutakhiran rencana induk sanitasi daerah. Baik melalui program Pengembangan Sanitasi Kabupaten (DSS) maupun Program Percepatan Sanitasi Permukiman (SSAP) dalam Program Memorandum (PM) atau data kelurahan dari kegiatan lain, diusulkan untuk mengidentifikasi minimal lima desa/kelurahan terkait sanitasi permukiman. Seiring dengan Program Percepatan Perluasan Fasilitas

Sanitasi Kabupaten Siak yang memasuki tahap kedua pada tahun 2015-2019, terdapat peluang untuk meninjau kembali Dokumen Perencanaan Perluasan Fasilitas Sanitasi Kabupaten Siak.

Guna mengetahui tingkat persiapan dari kandidat wilayah, dilibatkan Koordinator Program Taktis SANIMAS di tingkat Provinsi Riau (Fas-Prov), Tim Teknis Fungsional Lokasi (TFL), Teknis, serta Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Siak., dan Tim Pelaksana Pusat Prasarana Permukiman Provinsi Riau melakukan pengecekan long list untuk menentukan daftar desa yang berpotensi untuk didukung melalui Program SANIMAS Reguler 2020 pada tahap ini. Terdapat 14 kelurahan di Kabupaten Siak pada tahun 2020, yang masing-masing memiliki dampak terhadap lingkungan sosial melalui kegiatan sehari-hari berupa limbah air rumah tangga. Tualang adalah pemekaran dari Kecamatan Siak, yang dimekarkan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk dirinci Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun/Jumlah				\bar{x}	%
		2018	2019	2020	2021		
1	Minas	32.953	33.810	28.948	29.249	31.240	3,30%
2	Sungai Mandau	9.432	9.720	9.128	9.333	9.403	0,99%
3	Kandis	74.849	77.110	74.727	76.590	75.819	8,01%
4	Siak	28.277	29.110	31.144	32.215	30.186	3,19%
5	Kerinci kanan	28.669	29.350	23.783	23.870	26.418	2,79%
6	Tualang	131.464	134.730	120.655	122.349	127.299	13,45%
7	Dayun	33.211	33.980	30.959	31.414	32.391	3,42%
8	Lubuk dalam	21.570	22.140	19.905	20.210	20.956	2,21%
9	Koto gasib	23.148	23.680	23.469	24.007	23.576	2,49%
10	Mempura	17.927	18.390	16.951	17.248	17.629	1,86%
11	Sungai apit	30.842	31.470	30.997	31.638	31.236	3,30%
12	Bunga raya	26.898	27.660	26.777	27.414	27.187	2,87%
13	Sabak auh	12.286	12.580	12.911	13.256	12.758	1,35%
14	Pusako	6.144	6.260	7.586	7.890	6.970	0,74%
Jumlah total		477.670	489.990	457.940	466.683	473.070	50,00%

Sumber: *Olahan Peneliti (Badan Pusat Statistik Kab. Siak 2019-2022)*

Berdasarkan data table 1.1 dapat dilihat bahwa kecamatan Tualang merupakan jumlah penduduk terbanyak dengan presentasi penghasil air

limbah domestic dari kegiatan sehari-hari yang paling besar. Jika 1 Rumah Tangga menghasilkan 1 Lt/hari dengan rata-rata jumlah penduduk kec. tualang 127 : 4 (ayah, ibu, dan dua orang anak) =31 Lt x30(hari)= 930Lt /1 bln, maka kontribusi air limbah ini Perhari bahkan Perbulan benar-benar Perlu penanganan oleh pemerintah daerah. Nyatanya air limbah domestik ini masih belum dikelola dengan baik.

Pengelolaan air limbah rumahtangga (*domestic*) harus memenuhi baku mutu. Pengelolaan ini melibatkan kegiatan pengelolaan air limbah domestik oleh unit pengelolaan air limbah, yang sistem pengolahannya meliputi skala kecil (*on-site*) dan skala besar (*off-site*). Kriteria kelayakan pengolahan air limbah harus diperhatikan, baik dari segi fisik, sosial, maupun ekonomi, dan selain itu juga pengelola/operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari bupati ,izin mengelola air limbah domestik dengan SPAL-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan dengan ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Siak No.1 Tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Kajian riset ini memakai metode penelitian kualitatif, studi kasus dan analisis deskriptif. Riset dengan metode kualitatif adalah penelitian yang yang di pakai untuk menggali dan memaknai suatu masalah sosial atau kemanusiaan bagi individu atau kelompok yang berbeda. Proses penelitian kualitatif ini membutuhkan usaha yang cukup besar, termasuk pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data yang spesifik dari partisipan, analisis data secara induktif dari tema-tema yang spesifik ke yang umum dan interpretasi makna dari data tersebut (Creswell, 2016). Menurut Sugiono (2014:3) mengatakan bahwa metode penelitian secara umum dapat diartikan sebagai cara Ilmiah dalam mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Oleh karena itu, metode penelitian merupakan cara-cara yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai data-data yang ditemukan selama di lapangan. Pokok intinya teknik kualitatif tersebut adalah proses penelitian yang berupa deskriptif yaitu tertulis dalam kata-kata/kalimat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain studi kasus di mana peneliti mengembangkan dan menganalisis studi kasus yang mendalam tentang suatu kebijakan, peristiwa, tindakan atau proses yang berkaitan dengan fenomena sosial (Creswell, 2016). Studi kasus merupakan eksplorasi dari masalah atau tempat yang diteliti, dan karena studi kasus memiliki waktu yang terbatas, maka peneliti lebih mudah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kebijakan

sanitasi rumah tangga di Kecamatan Tualang (Perda Kab. Siak No. 1 Tahun 2017).

Dalam kajian riset ini, peneliti meneliti di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, Sungai Mempura Kecamatan Mempura, instansi Pemerintah Kabupaten Siak, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, dan organisasi lokal yang mungkin terlibat dalam pengelolaan air limbah lokal. Sumber-sumber dan kemungkinan pendanaan yang tersedia untuk pengelolaan air limbah domestik. pada kajian studi ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk mencari informan, yang artinya pemilihan responden berdasarkan kriteria atau ciri-ciri tertentu yang relevan dan valid, yaitu informan tersebut memahami dan mengetahui topik serta bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

Adapun teknis pengambilan data adalah bagaimana metode yang di pakai oleh peneliti guna mengumpulkan data di lapangan. Dalam penelitian ini, cara memperoleh data yang dipergunakan adalah sebagai berikut: Pengamatan (Observasi) merupakan Pengamatan secara langsung terhadap realita yang ada sebenarnya pada objek yang di teliti Interview (Wawancara) Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan data tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten siak kec. Tualang No. 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui tanya jawab langsung dengan para informan. Wawancara adalah proses pengumpulan informasi melalui tanya jawab untuk tujuan penelitian, di mana kita bertatap muka dan menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi topik yang telah ditentukan secara mendalam (sesuai dengan tujuan dan maksud wawancara). dan informasi lainnya Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan diambil bertujuan untuk melengkapi data dalam penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017). Literatur dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari lembaga pemerintah atau organisasi. Informasi yang diperoleh melalui dokumentasi tersebut dapat berupa gambar dokumen tertulis maupun media elektronik. Proses pengolahan data ialah kegiatan penyusunan informasi dengan cara yang sistematis untuk memudahkan penelitiannya penarikan makna. Menurut Bogdan dan Sugiyono, proses pengolahan data adalah proses sistematis pencarian sekaligus peringkasan informasi dari berbagai hasil diskusi, tinjauan pustaka, laporan penelitian, dan data lainnya sehingga menjadi lebih bermakna dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses

pengolahan data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis didasarkan pada data terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar kebijakan adalah ukuran apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak. Standar kebijakan harus jelas dan terukur agar tidak menimbulkan konflik di antara para aktor pelaksana kebijakan. Dengan demikian, standar kebijakan menjadi tolok ukur untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah. Karena kondisi-kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, maka penting juga untuk memastikan bahwa kondisi-kondisi tersebut relevan dengan kebijakan dan realistis di tingkat pelaksana.

Sumber Daya

Merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah kebijakan. keberhasilan proses implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kab Siak No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestic Di Kec. Tualang juga sangat bergantung pada sumber daya yang ada.

1. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia (SDM) menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Dengan adanya Sumber daya manusia yang berkualitas sesuai yang di butuhkan dalam menjalankan kebijakan maka kebijakan tersebut akan berjalan dan memungkinkan untuk menjawab isu yang ada dalam masyarakat, Namun akan berbanding terbalik apabila Sumber Manusia yang ada tidak sesuai kebutuhan dalam menjalankan kebijakan, tidak kompeten, tidak mempunyai kapasitas dalam menjalankan kebijakan tersebut yang ada akibatnya dapat membuat masyarakat tidak Puas dengan kebijakan yang ada dan tidak mempercayai pemerintah dengan kebijakan yang mereka anggap tidak cakap dalam menjalankan kebijakan tersebut.
2. Sumber Daya Anggaran. Implementasi kebijakan tidak hanya menitikberatkan pada sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting, namun dalam pelaksanaannya faktor penting lainnya adalah sumber daya anggaran (dana) yang juga memberikan dampak yang besar. Selain pelaksana kebijakan, ketersediaan fasilitas juga turut mempengaruhi keberhasilan

kebijakan, dan tentu saja hal ini tidak terlepas dari dana yang tersedia sehingga memungkinkan para pelaksana untuk melaksanakan program-program kerja yang terkait dengan pencapaian tujuan kebijakan. Berkenaan dengan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Tualang (studi kasus Perda Kab. Siak No. 1 Tahun 2017).

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Setelah Sumber daya Manusia yang berkualitas demikian juga adanya Sumber daya Dana (Anggaran) maka selanjutnya factor pendukung yang juga harus ada adalah sarana prasarana yang layak, yang dapat memfasilitasi masyarakat yang akan menunjang keberhasilan implementasi suatu peraturan atau kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di kecamatan tualang (studi kasus perda kab.siak no.1 tahun 2017) juga sangat membutuhkan sarana Prasarana yang memadai.

Komunikasi Antar Organisasi

Ketika menerapkan suatu kebijakan, sangat penting bagi orang-orang dalam organisasi untuk saling memahami satu sama lain untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan dan memahami etika komunikasi yang tidak boleh menimbulkan konflik atau kesalahpahaman di antara mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui batasan dan tujuan dari kebijakan tersebut. Komunikasi yang baik dapat mempermudah proses pencapaian setiap tujuan, dan komunikasi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi juga harus konsisten untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Karakteristik Agen Pelaksana

Salah satu karakteristik organisasi atau lembaga yang selalu dikaitkan dengan eksistensinya adalah birokrasi, yang memiliki aturan dan tata tertib organisasi yang terstruktur, etos kerja organisasi, para pelaksana yang terkait secara disiplin yang membentuk integritas organisasi, yang mencakup visi dan misi. Meskipun terkadang rumit, birokrasi merupakan alat penting yang membantu negara untuk membangun sistem administrasi yang melayani kepentingan masyarakat. Struktur organisasi yang rumit dapat menghambat dan memperlambat kelancaran administrasi atau kebijakan.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi eksternal (sosial, ekonomi dan politik) juga memainkan peran yang sangat penting dalam mengkaji keberhasilan implementasi,

karena merupakan salah satu komponen terpenting dalam mendorong keberhasilan implementasi. Kondisi eksternal sosial (budaya, norma, adat istiadat), ekonomi dan politik dapat menjadi penyebab kegagalan suatu kebijakan.

- 1) Kondisi Sosial. Hubungan sosial merupakan elemen penting yang berperan dalam implementasi kebijakan yang diadopsi untuk mengatasi masalah di masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat diharapkan mencapai tujuannya, yang mana tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Menjangkau masyarakat untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dapat mempermudah interaksi pembuat kebijakan dengan masyarakat, sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi aturan di masyarakat, apa yang menjadi kebiasaan masyarakat, sehingga tidak ada hal yang bersifat mengecilkan hati masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 2) Kondisi ekonomi (keuangan) juga merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan air limbah rumah tangga di Kecamatan Tualang (studi kasus kerugian Kab. Siak 1 tahun 2017). Mengetahui bagaimana kondisi ekonomi masyarakat dapat secara efektif mempercepat pembangunan infrastruktur yang memang dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah.
- 3) Keberhasilan proses implementasi kebijakan juga dapat dilihat dari sisi dampak kebijakan yang diimplementasikan. Kebijakan yang dicanangkan dapat dilihat baik melalui kepentingan kelompok tertentu maupun pengaruh elit politik yang berkuasa, yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Tualang (Studi Kasus Strata Kab. Siak No. 1, 2017).

Disposisi Implementor

Watak, komitmen, disiplin, sifat demokratis, tanggung jawab atau kecenderungan sikap pihak-pihak pelaksana terhadap tugas yang di amanahkan sangat penting terhadap keberhasilan proses implementasi kebijakan. Setiap keberhasilan kebijakan atau program yang di usung erat kaitannya dengan bagaimana reaksi dari para implementor sehingga sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat berhasil.

Kesadaran Diri Masyarakat

Karena pengelolaan air limbah kota merupakan proses dari bawah ke atas, maka perlu ditanamkan kepada masyarakat tentang nilai dan pemahaman tentang pengelolaan air limbah kota, termasuk dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Pengamatan di masyarakat Tualang, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air limbah kota terbatas pada dampak yang terlihat dan dapat dirasakan secara langsung, seperti sumber bau, polusi lingkungan, dan tempat berkembang biaknya nyamuk. Di sisi lain, hanya sedikit yang diketahui tentang dampak air limbah domestik terhadap pencemaran air tanah dan air permukaan, yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat setempat tentang dampak air limbah domestik terhadap pencemaran air masih kurang. Di sisi lain, penduduk setempat tampaknya cukup kritis terhadap respon pemerintah terhadap keberadaan air limbah domestik di Tualang. Sebagian besar penduduk prihatin dengan kurangnya infrastruktur untuk pengelolaan air limbah domestik. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan dan pencegahan air limbah domestik yang tepat. Pengelolaan air limbah domestik dapat dimulai dengan langkah-langkah dasar yang dapat dilakukan sendiri oleh penduduk setempat, dimulai dengan perlindungan lingkungan. Pertama-tama, penting untuk menyadari pentingnya mengelola air limbah domestik dengan cara yang tidak mencemari lingkungan.

Sumber Daya Dana

Sumber daya adalah salah satu factor pendukung penting yang harus ada dalam berhasilnya atau gagalnya suatu implementasi kebijakan hal tersebut juga berguna untuk melihat apakah sumber daya yang ada memadai, karena jika tidak maka suatu kebijakan akan mengalami kesulitan dalam proses pelaksanaannya. Dalam Implementasi Peraturan Kab.Siak No.1 Tahun 2017 ini sumber daya yang dimaksud adalah Sumber daya Anggaran Dana.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, peneliti menarik kesimpulan dan memberi saran mengenai implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di kecamatan tualang (studi kasus perda kab.siak no.1 tahun 2017) bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kecamatan Tualang (Studi Kasus Perda Kab.Siak No.1 Tahun 2017) belum Terimplementasi dengan baik. Komunikasi Organisasi yang terjalin antar pelaksana sudah baik, secara vertical maupun Horizontal sehingga resiko kemungkinan untuk terjadinya mis

komunikasi sangat kecil, Setiap TFL(Tenaga Fasiliator Lapangan) juga sebelumnya telah melalui pelatihan dan mereka adalah orang telah paham dan dipahamkan. Sebagai Sarana Prasarana yang sangat dibutuhkan IPAL-T (Instalasi Pengelolaan lumpur tinja) yang masih hanya ada 1 dengan truk yang 1 juga sekabupaten Siak, maka sarana Prasarana ini sangat tidak efisien dari segi waktu apabila ketempat yang jauh dari lokasi berada yaitu di tualang barat. Kendala yang ditemukan alam implementasi kebijakan Peraturan daerah Kabupaten siak No.1 Tahun 2017 adalah Masyarakat yang cukup memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan air limbah domestic yang benar.. Implementor yang ada sebagai sumber daya manusia sudah melaksanakan tupoksi masing-masing sesuai dengan kebijakan yang ada. Namun begitu sumber daya anggaran dana yang di kucurkan belum sesuai untuk mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan air limbah domestik di kecamatan tualang (studi kasus perda kab.siak no.1 tahun 2017).

2. Dalam pelaksanaan implementasi air limbah domestik ini dengan masyarakat yang partisipasinya masih rendah harus digerakan lagi, Jika tidak ada perubahan kepedulian terhadap lingkungan, lebih baik menggunakan sanksi sosial untuk memaksa mereka bekerja sama. Bagi para pemangku kepentingan fasilitas seperti IPLT, akan sangat baik jika tidak hanya 1 saja, tetapi yang lain menjadi prioritas

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Andreas, S. (2016). *Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestic Di-Terpusat Skala Permukiman*. Jakarta: Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik: Pengantar (1st ed.)*. Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi* (keenam). Bandung: Alfabeta
- AG. Subarsono, 2005, "Analisis Kebijakan Publik". Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran* (4th. ed.) Yogyakarta: Pustaka belajar
- Indiahono, D. (2017) *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (2nded.; Turi, ed.). Yogyakarta: Gava Media
- Haedar, Tarigan, dkk. *Artikulasi konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan kriteria pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik. 2008
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Gorontalo: UNGPress
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (3rd ed.; Gedeona Hendrikus T, ed.), Bandung : Alfabeta
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy. : Dinamika Kebijakan Public, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan, Etika Kebijakan Publik* (6th ed.;). Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasalong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik* . Bandung : Alfabeta
- Saily, R. 2017. *Model Kajian Pengendalian Pencemaran sungai siak menggunakan pendekatan model WASP versi 7.3*: Universitas Riau
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik* (Konsep, teori dan Paktek) Pekanbaru: Alaf Riau

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membum.* Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman offset.

Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi KasusKomparatif) .* Yogyakarta: CAPS

Jurnal

Nugraheni, R., & Wijayati, E. W. (2021). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pencemaran Air Permukaan oleh Air Limbah Industri di Daerah Aliran Sungai Brantas Kediri Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan , Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(1), 1–7.
<https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i1.7227>

Yuda, O. O., & Purnomo, E. P. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(2), 163–171.
<https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1906>

Irsyad Pratama. (2021). Peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran air di perawang kabupaten siak tahun 2020 *JOM FISIP Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021.*

Kusnaldi , Madya, Zubaidah. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944*
DOI:10.36312/jisip.v6i1.3188/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

Skripsi

Fajrin Muhammad, 2018. *Implementasi Perda 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*

Septi Pratiwi, Rochma. 2015. *Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Di Kelurahan Keputih Surabaya*

Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten. Siak Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestic No. 1 Tahun 2017

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.112 Tahun 2003 Tentang
Baku Mutu Air Limbah Domestik